

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ganra Kabupaten Soppeng

Asbudi ^{1*}, Imam Syahid ², Mujiburrahman ³, Muh. Fichriyadi Hastira ⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Mulawarman, Samarinda

* asbudi@fisip.unmul.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan kepala desa memengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ganra, Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Ganra, Kabupaten Soppeng. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan dalam mendorong transparansi pemerintahan desa serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian meliputi Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik terdapat empat gaya kepemimpinan yang diterapkan secara situasional, yaitu gaya direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Namun, gaya kepemimpinan yang dominan adalah gaya konsultatif. Dominasi tersebut tercermin dalam praktik musyawarah desa, mekanisme konsultasi terbuka, penyampaian informasi anggaran secara transparan, serta komunikasi langsung antara pemerintah desa dan masyarakat. Gaya kepemimpinan konsultatif terbukti mendorong peningkatan transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Faktor-faktor yang memengaruhi gaya kepemimpinan meliputi tingkat pengetahuan kepala desa, pengalaman organisasi, kapasitas manajerial, serta karakter personal pemimpin.

Keywords: *Gaya Kepemimpinan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan Desa, Transparansi*

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Transparansi diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat legitimasi kebijakan. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, penguatan kewenangan desa melalui desentralisasi fiskal dan kebijakan dana desa menuntut adanya pengelolaan informasi yang lebih terbuka dan akuntabel (Arifin et al., 2020). Secara empiris, praktik keterbukaan informasi di tingkat desa masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya sistem dokumentasi, serta ketergantungan pada kepemimpinan kepala desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di desa tidak semata-mata ditentukan oleh

regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan yang menjalankan kebijakan tersebut.

Secara teoretis, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik (Asbari et al., 2022). Literatur administrasi publik menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik dan perilaku aparatur (Nguyen et al., 2023). Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, pemimpin berperan sebagai fasilitator komunikasi, mediator kepentingan, dan penggerak partisipasi (Ansell & Torfing, 2021). Gaya kepemimpinan kepala desa menjadi variabel penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari praktik good governance (Sofyani et al., 2023). Memahami bagaimana gaya kepemimpinan dioperasionisasikan dalam konteks kebijakan keterbukaan informasi publik di tingkat desa menjadi kajian yang relevan dan penting (Pratolo et al., 2024).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transparansi berkontribusi terhadap peningkatan *trust* dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan lokal, transparansi juga berhubungan erat dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan efektivitas pelayanan publik (Dwirandra & Astika, 2019). Studi mengenai implementasi *e-government* di tingkat desa menunjukkan bahwa digitalisasi informasi dapat memperluas akses publik terhadap data pemerintahan (Napitupulu et al., 2018). Penelitian terdahulu melalui tinjauan sistematis terhadap 187 studi tentang transparansi pemerintah selama 25 tahun menemukan bahwa dampak transparansi terhadap *trust* publik bersifat kondisional dan bergantung pada konteks kelembagaan (Cucciniello et al., 2017). Kajian tersebut memiliki fokus pada tinjauan lintas disiplin terhadap berbagai bentuk transparansi dan hasilnya, namun keterbatasannya terletak pada tidak adanya analisis mendalam mengenai peran kepemimpinan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara transparansi dan *trust* publik.

Kajian kepemimpinan dalam sektor publik menekankan pentingnya kesesuaian gaya kepemimpinan dengan konteks organisasi. Model *governance network* juga menempatkan pemimpin sebagai aktor kunci dalam mengelola interaksi antar-aktor dan membangun sinergi kebijakan (Klijn & Koppenjan, 2016). Penelitian terdahulu secara spesifik mengkaji hubungan antara gaya kepemimpinan dan transparansi dalam pemerintahan desa di Indonesia (Suryanto & Sari, 2020). Studi tersebut menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan demokratis berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan *dana desa*. Fokus penelitian ini pada dimensi kepemimpinan transformasional memberikan kontribusi penting, namun keterbatasannya terletak pada tidak adanya analisis terhadap tipologi gaya kepemimpinan yang lebih komprehensif (direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif) dalam konteks kebijakan keterbukaan informasi publik. Studi lainnya juga meneliti keterbukaan informasi publik dalam tata kelola desa dan menemukan bahwa faktor kelembagaan dan kapasitas aparatur menjadi determinan utama (Raharjo & Santoso, 2021). Penelitian tersebut lebih menekankan aspek kelembagaan dan belum secara mendalam mengeksplorasi peran gaya kepemimpinan sebagai variabel utama yang membentuk dinamika implementasi kebijakan keterbukaan informasi.

Perbandingan antara ketiga studi tersebut menunjukkan perbedaan fokus dan cakupan yang signifikan. Studi terdahulu mengkaji transparansi dari perspektif makro lintas negara dengan pendekatan tinjauan sistematis (Cucciniello et al., 2017). Studi terdahulu meneliti hubungan gaya kepemimpinan dan transparansi di level desa dengan pendekatan kuantitatif (Suryanto & Sari, 2020). Serta studi lainnya juga menganalisis keterbukaan informasi dari aspek kelembagaan (Raharjo & Santoso, 2021). Ketiga studi tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis tipologi gaya kepemimpinan dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi

publik pada level desa melalui pendekatan kualitatif studi kasus. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana variasi gaya kepemimpinan kepala desa (direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif) dioperasionalisasikan dalam konteks kebijakan keterbukaan informasi publik di desa, serta faktor-faktor apa yang membentuk pola kepemimpinan tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Ganra Kabupaten Soppeng, serta faktor-faktor apa yang memengaruhinya? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan yang dominan diterapkan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada: (1) integrasi analisis tipologi empat gaya kepemimpinan dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam konteks pemerintahan desa; (2) penggunaan pendekatan studi kasus mendalam yang memungkinkan pemahaman kontekstual tentang dinamika kepemimpinan situasional; dan (3) identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang membentuk pola kepemimpinan dalam tata kelola desa yang transparan dan partisipatif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, proses, serta interaksi sosial yang terjadi dalam praktik kepemimpinan dan tata kelola informasi publik di tingkat desa. Desain studi kasus digunakan agar fenomena yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan desa setempat. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Maret hingga Juni 2024, dengan mempertimbangkan jadwal kegiatan pemerintahan desa termasuk musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang relevan dengan fokus penelitian.

Subjek penelitian ini meliputi Kepala Desa Ganra sebagai pemegang otoritas eksekutif di tingkat desa, Sekretaris Desa, perangkat desa yang menangani administrasi dan pengelolaan informasi, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Ganra. Jumlah informan utama sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Ketua BPD, dan 2 orang tokoh masyarakat. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai praktik kepemimpinan dan mekanisme penyampaian informasi publik di tingkat desa.

Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari: (1) pedoman wawancara semi-terstruktur yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka mengenai gaya kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, praktik keterbukaan informasi, serta faktor pendukung dan penghambat; (2) lembar observasi yang digunakan untuk mencatat pola komunikasi, proses musyawarah, dan mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat; dan (3) format analisis dokumentasi untuk menelaah dokumen resmi desa seperti peraturan desa, laporan pertanggungjawaban anggaran, notulensi musyawarah desa, dan media informasi publik lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta praktik kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Desa dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung pola komunikasi, proses musyawarah, serta mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi desa yang relevan dengan keterbukaan informasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi serta validitas informasi yang diperoleh. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi tiga komponen utama, yaitu: (1) reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pengkategorian data mentah berdasarkan tipologi gaya kepemimpinan serta indikator implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik; (2) penyajian data, yaitu pengorganisasian data ke dalam bentuk matriks dan narasi deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar-temuan; dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi), yaitu proses penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan temuan empiris di lapangan yang divalidasi melalui triangulasi. Proses analisis berlangsung secara interaktif dan berulang antara ketiga komponen tersebut selama dan setelah pengumpulan data, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyempurnakan kategorisasi dan interpretasi secara berkelanjutan.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Ganra Kabupaten Soppeng dipengaruhi secara signifikan oleh gaya kepemimpinan Kepala Desa. Berdasarkan hasil analisis data wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa terdapat empat gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu gaya direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Keempat gaya tersebut tidak diterapkan secara tunggal, melainkan digunakan secara situasional sesuai dengan konteks kebijakan dan kebutuhan organisasi desa.

Gaya kepemimpinan direktif terlihat dalam pengambilan keputusan yang bersifat administratif dan teknis, terutama dalam penugasan perangkat desa serta penyusunan dokumen formal yang berkaitan dengan pelaporan dan administrasi keterbukaan informasi. Dalam situasi tertentu yang membutuhkan ketegasan dan percepatan keputusan, Kepala Desa memberikan arahan secara langsung kepada perangkat desa tanpa melalui proses musyawarah yang panjang.

Gaya kepemimpinan konsultatif merupakan gaya yang paling dominan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa secara aktif melakukan konsultasi dengan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penyampaian informasi publik. Praktik konsultatif ini tercermin dalam penyelenggaraan musyawarah desa, forum diskusi, serta komunikasi terbuka mengenai pengelolaan anggaran dan program pembangunan desa.

Gaya partisipatif juga ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait pengelolaan informasi publik. Keterlibatan masyarakat ini terlihat dalam forum musyawarah desa dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan unsur masyarakat secara langsung.

Di samping itu, gaya delegatif tampak dalam pendelegasian tugas kepada perangkat desa, khususnya dalam pengelolaan administrasi informasi, dokumentasi kegiatan, dan penyediaan data publik. Kepala Desa memberikan kewenangan kepada perangkat yang dianggap kompeten untuk mengelola dokumen dan menyampaikan informasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Tabel 1. *Triangulasi Data Wawancara Tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa*

Informan	Fokus Pertanyaan	Pernyataan Kunci	Indikasi Gaya Kepemimpinan
Kepala Desa	Mekanisme pengambilan keputusan	Setiap kebijakan terkait informasi publik dibahas terlebih dahulu dengan perangkat desa dan BPD sebelum ditetapkan	Konsultatif
Sekretaris Desa	Pengelolaan administrasi informasi	Kepala Desa memberikan arahan langsung terkait penyusunan laporan dan dokumentasi informasi	Direktif
Perangkat Desa	Pelaksanaan tugas informasi publik	Tugas pengelolaan dokumen dan penyampaian informasi didelegasikan sesuai bidang masing-masing	Delegatif
Anggota BPD	Keterlibatan dalam kebijakan	BPD dilibatkan dalam pembahasan anggaran dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat	Konsultatif
Tokoh Masyarakat	Partisipasi masyarakat	Masyarakat diberikan ruang dalam musyawarah desa untuk menyampaikan saran dan kritik	Partisipatif
Kepala Desa	Transparansi anggaran	Informasi anggaran dipasang di papan informasi desa dan disampaikan dalam forum musyawarah	Konsultatif
Perangkat Desa	Koordinasi internal	Dalam kondisi mendesak, keputusan diambil langsung oleh Kepala Desa tanpa musyawarah panjang	Direktif
Masyarakat	Akses informasi	Informasi dapat diminta langsung ke kantor desa dan dilayani oleh perangkat	Delegatif

Berdasarkan keseluruhan data yang dianalisis, gaya kepemimpinan konsultatif menjadi pola dominan dalam implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Ganra. Dominasi tersebut ditunjukkan melalui frekuensi praktik konsultasi, keterlibatan BPD dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pola komunikasi terbuka antara Kepala Desa dan warga. Ditemukan pula bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penerapan gaya kepemimpinan meliputi pengalaman organisasi Kepala Desa, tingkat pendidikan, kemampuan manajerial, serta karakter personal yang komunikatif dan terbuka terhadap masukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Ganra berlangsung melalui kombinasi beberapa gaya kepemimpinan, dengan kecenderungan utama pada gaya konsultatif sebagai pendekatan yang paling sering digunakan dalam praktik pemerintahan desa.

Tabel 2. *Triangulasi Data Wawancara Faktor Pendukung dan Penghambat Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik*

Informan	Jabatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Pernyataan Kunci
H. Sudirman	Kepala Desa Ganra	Komitmen pimpinan terhadap transparansi	Keterbatasan sumber daya aparatur	"Kami berkomitmen membuka informasi kepada masyarakat, namun jumlah aparatur masih terbatas."
Nur Aisyah, S.IP	Sekretaris Desa	Koordinasi internal yang baik	Administrasi belum sepenuhnya terdigitalisasi	"Koordinasi berjalan baik, tetapi pengelolaan data masih dilakukan secara manual."

Informan	Jabatan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Pernyataan Kunci
Ahmad Yani	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pembagian tugas yang jelas	Keterbatasan fasilitas pendukung	"Tugas sudah dibagi sesuai bidang, namun sarana pendukung masih kurang."
Rahmat Hidayat	Ketua BPD	Peran aktif BPD dalam pengawasan	Partisipasi masyarakat belum merata	"BPD terlibat dalam pengawasan, tetapi tidak semua masyarakat hadir dalam musyawarah."
Siti Rahmawati	Tokoh Masyarakat	Adanya forum musyawarah desa	Pemahaman masyarakat tentang hak informasi masih terbatas	"Forum musyawarah terbuka, tetapi tidak semua warga memahami hak atas informasi."
Ahmad Yani	Kaur Tata Usaha dan Umum	Dukungan regulasi desa	Keterbatasan kapasitas teknis pengelolaan informasi	"Regulasi sudah ada, namun kemampuan teknis aparatur masih perlu ditingkatkan."
Siti Rahmawati	Tokoh Masyarakat	Akses langsung ke kantor desa	Minimnya pemanfaatan media digital	"Informasi dapat diminta langsung ke kantor desa, tetapi belum banyak menggunakan media online."

Tabel 2 menyajikan hasil wawancara terkait faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Ganra. Data diperoleh dari berbagai informan yang memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Ketua BPD, serta tokoh masyarakat. Variasi informan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi.

Berdasarkan tabel tersebut, faktor pendukung utama yang teridentifikasi adalah adanya komitmen pimpinan terhadap transparansi, koordinasi internal yang berjalan baik, pembagian tugas yang jelas di antara perangkat desa, peran aktif BPD dalam fungsi pengawasan, serta tersedianya forum musyawarah desa sebagai ruang partisipasi masyarakat. Dukungan regulasi desa dan akses langsung masyarakat ke kantor desa juga menjadi faktor yang memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik. Faktor penghambat seperti keterbatasan kapasitas aparatur dan minimnya digitalisasi informasi juga sejalan dengan temuan penelitian mengenai tantangan implementasi *e-government* di tingkat desa (Napitupulu et al., 2018). Komitmen pimpinan terhadap transparansi memperkuat temuan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur dan efektivitas kebijakan publik (Asfarina et al., 2026).

Beberapa faktor penghambat juga ditemukan. Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur desa menjadi kendala dalam pengelolaan informasi secara optimal. Administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi serta minimnya fasilitas pendukung turut memengaruhi efektivitas penyampaian informasi. Partisipasi masyarakat yang belum merata dan rendahnya pemahaman sebagian warga mengenai hak atas informasi publik juga menjadi hambatan dalam mewujudkan transparansi yang maksimal. Minimnya pemanfaatan media digital sebagai sarana publikasi informasi desa juga menjadi salah satu kendala yang teridentifikasi. Secara keseluruhan, data dalam tabel menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Ganra dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal organisasi dan faktor eksternal yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat serta dukungan sarana dan prasarana.

Pembahasan

Dinamika Gaya Kepemimpinan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Ganra tidak dijalankan melalui satu pola kepemimpinan yang bersifat tunggal dan kaku, melainkan melalui kombinasi beberapa gaya kepemimpinan yang bersifat situasional dan adaptif. Temuan ini mengindikasikan bahwa Kepala Desa tidak mengandalkan satu pendekatan kepemimpinan tertentu, tetapi secara dinamis menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan organisasi, karakteristik tugas, serta kondisi sosial masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, teridentifikasi empat gaya kepemimpinan utama yang digunakan, yaitu gaya direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Keempat gaya ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam konteks keterbukaan informasi publik.

Variasi gaya kepemimpinan tersebut mencerminkan adanya fleksibilitas dan kapasitas adaptif dari Kepala Desa dalam merespons dinamika organisasi dan tuntutan kebijakan publik. Dalam beberapa situasi, Kepala Desa menunjukkan pendekatan yang terbuka dan partisipatif, sementara dalam kondisi lain yang membutuhkan ketegasan, digunakan pendekatan yang lebih direktif. Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan konsep kepemimpinan situasional yang menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan konteks organisasi dan karakteristik bawahan (Sari et al., 2026). Kepala Desa dalam penelitian ini tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan formal, tetapi juga sebagai aktor strategis yang mampu mengelola keseimbangan antara tuntutan administratif dan kebutuhan partisipatif masyarakat.

Dari keempat gaya yang teridentifikasi, gaya kepemimpinan konsultatif merupakan pola yang paling dominan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Dominasi ini terlihat secara konsisten dalam berbagai praktik pemerintahan desa, seperti pelaksanaan musyawarah desa sebelum penetapan kebijakan, keterlibatan aktif perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses diskusi, serta adanya komunikasi terbuka terkait pengelolaan anggaran dan program pembangunan. Dalam praktiknya, Kepala Desa tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan melalui proses konsultasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara dialogis dan kolektif, sehingga menciptakan ruang deliberasi yang inklusif.

Temuan ini memperkuat perspektif *collaborative governance* yang menekankan pentingnya interaksi antar-aktor dalam proses pengambilan keputusan publik (Sørensen & Torfing, 2016; Fachhrurrazie & Mursalin, 2021). Dalam kerangka ini, pemimpin tidak lagi diposisikan sebagai aktor dominan, tetapi sebagai *fasilitator* yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan mendorong terciptanya konsensus. Praktik konsultatif yang diterapkan juga berimplikasi positif terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa transparansi yang didukung oleh komunikasi terbuka dapat meningkatkan *trust* masyarakat terhadap pemerintah (Cucciniello et al., 2017). Gaya kepemimpinan konsultatif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun legitimasi pemerintahan desa.

Dalam perspektif lain, gaya kepemimpinan direktif juga ditemukan dalam implementasi kebijakan, terutama dalam situasi yang bersifat administratif dan membutuhkan ketegasan serta efisiensi waktu. Contohnya terlihat dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran, pengelolaan dokumen administratif, serta penyelesaian tugas-tugas yang memiliki

tenggat waktu tertentu. Dalam kondisi tersebut, Kepala Desa memberikan instruksi secara langsung kepada perangkat desa tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa gaya direktif tetap diperlukan dalam menjaga efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan tugas. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi publik melalui kejelasan instruksi dan kontrol (Ardiawati et al., 2022; Sitorus et al., 2022).

Lebih lanjut, gaya kepemimpinan delegatif terlihat dalam praktik pendelegasian tugas kepada perangkat desa, khususnya dalam pengelolaan informasi publik, dokumentasi kegiatan, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat. Kepala Desa memberikan kewenangan kepada perangkat yang dianggap memiliki kompetensi sesuai bidangnya untuk mengelola informasi dan menjalankan tugas secara mandiri. Pendelegasian ini menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kapasitas aparatur desa, sekaligus menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Adapun gaya kepemimpinan partisipatif tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam berbagai forum musyawarah desa. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait kebijakan publik, termasuk dalam hal pengelolaan informasi dan transparansi anggaran. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan partisipasi sebagai salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis (Suryanto & Sari, 2020; Raharjo & Santoso, 2021). Keterlibatan masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan, karena keputusan yang dihasilkan didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat.

Secara keseluruhan, dinamika keempat gaya kepemimpinan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa Ganra berlangsung melalui kombinasi kepemimpinan yang adaptif dan kontekstual. Kepala Desa mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan kepemimpinan sesuai dengan situasi yang dihadapi, sehingga menciptakan keseimbangan antara efektivitas administratif dan partisipasi publik. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga oleh kapasitas kepemimpinan dalam mengelola interaksi sosial, membangun komunikasi yang efektif, serta menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dalam pemerintahan desa.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Gaya Kepemimpinan

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi penerapan gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu pemimpin, tetapi juga oleh lingkungan organisasi dan sosial yang melingkupinya. Kepemimpinan dalam konteks pemerintahan desa merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kapasitas personal dan dinamika eksternal.

Faktor internal pertama yang memengaruhi gaya kepemimpinan adalah pengalaman organisasi dan latar belakang kepemimpinan Kepala Desa sebelum menjabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sebelumnya, baik dalam organisasi formal maupun nonformal, berkontribusi dalam membentuk pola komunikasi, cara pengambilan keputusan, serta tingkat keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak. Kepala Desa yang memiliki pengalaman organisasi yang lebih luas cenderung menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih fleksibel dan

adaptif. Temuan ini sejalan dengan teori kepemimpinan kontemporer yang menekankan bahwa pengalaman merupakan determinan penting dalam pembentukan kompetensi kepemimpinan dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi situasi yang kompleks (Northouse, 2018). Pengalaman tidak hanya membentuk keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas reflektif pemimpin dalam merespons dinamika kebijakan publik.

Faktor internal kedua adalah tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap administrasi pemerintahan serta regulasi keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dengan tingkat pendidikan dan pemahaman regulasi yang lebih baik cenderung lebih responsif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi memungkinkan pemimpin untuk mengimplementasikan kebijakan secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kapasitas kognitif dan pengetahuan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik (Halim & Abdullah, 2020; Kristiansen et al., 2022). Pendidikan dan pemahaman regulasi menjadi faktor penting dalam mendorong praktik kepemimpinan yang transparan dan akuntabel.

Faktor internal ketiga adalah kapasitas manajerial yang mencakup kemampuan mengoordinasikan perangkat desa, membagi tugas, serta mengelola konflik dalam organisasi. Kapasitas ini menjadi kunci dalam mengintegrasikan berbagai gaya kepemimpinan secara efektif sesuai dengan kebutuhan situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa yang memiliki kemampuan manajerial yang baik mampu mengombinasikan gaya direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif secara proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada gaya tertentu, tetapi juga pada kemampuan mengelola sumber daya organisasi secara optimal. Dalam perspektif administrasi publik, kapasitas manajerial merupakan salah satu determinan utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Wulandari & Suryanto, 2023).

Di samping faktor internal, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi gaya kepemimpinan Kepala Desa. Salah satu faktor eksternal yang paling menonjol adalah tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi. Masyarakat desa yang semakin kritis dan memiliki akses terhadap informasi mendorong pemerintah desa untuk lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Tekanan publik ini mendorong Kepala Desa untuk mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan konsultatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan masyarakat dan ekspektasi publik merupakan faktor penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Cucciniello et al., 2017). Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memengaruhi arah kepemimpinan dalam pemerintahan desa.

Faktor eksternal lainnya adalah peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah desa. Keberadaan BPD mendorong Kepala Desa untuk lebih berhati-hati dan akuntabel dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Hal ini mencerminkan adanya mekanisme *checks and balances* dalam tata kelola pemerintahan desa. Temuan ini sejalan dengan konsep tata kelola pemerintahan modern yang menekankan pentingnya pengawasan institusional dalam meningkatkan akuntabilitas publik (Suryanto & Sari, 2020; Sørensen &

Torring, 2016). BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai aktor yang memengaruhi dinamika kepemimpinan di tingkat desa.

Dinamika sosial masyarakat desa juga turut membentuk pola kepemimpinan yang kontekstual. Nilai-nilai budaya lokal, norma sosial, serta struktur hubungan sosial dalam masyarakat desa memengaruhi cara Kepala Desa dalam berinteraksi dan mengambil keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa cenderung menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan karakteristik masyarakat yang dipimpinnya, sehingga tercipta pendekatan yang lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa kepemimpinan dalam sektor publik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya lokal (Yunus & Pamungkas, 2021; Sopiarti, 2022). Kepemimpinan di tingkat desa memiliki karakteristik yang khas dan tidak dapat disamakan dengan kepemimpinan di tingkat organisasi formal lainnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti pengalaman, pendidikan, dan kapasitas manajerial membentuk dasar kompetensi kepemimpinan, sementara faktor eksternal seperti tekanan masyarakat, peran BPD, dan dinamika sosial membentuk konteks penerapannya. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kepemimpinan dalam sektor publik bersifat kontekstual, adaptif, dan dinamis. Efektivitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh karakteristik individu pemimpin, tetapi juga oleh kemampuan dalam merespons lingkungan sosial dan institusional secara tepat (Sørensen & Torring, 2016; Halim & Abdullah, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Ganra Kabupaten Soppeng dipengaruhi oleh dinamika gaya kepemimpinan Kepala Desa yang bersifat situasional dan adaptif. Penelitian ini mengidentifikasi empat gaya kepemimpinan yang diterapkan, yaitu direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Di antara keempat gaya tersebut, gaya konsultatif menjadi pola yang paling dominan. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme musyawarah sebelum pengambilan keputusan, keterlibatan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan kebijakan, serta komunikasi terbuka dengan masyarakat terkait pengelolaan informasi publik dan anggaran desa. Dominasi gaya konsultatif menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh pendekatan kepemimpinan yang mendorong dialog, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara aktif.

Penerapan gaya direktif dan delegatif dalam situasi tertentu menunjukkan adanya fleksibilitas kepemimpinan dalam menjaga efektivitas administrasi dan efisiensi pembagian tugas organisasi. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan Kepala Desa memiliki peran strategis dalam membentuk praktik transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kepemimpinan sektor publik pada level pemerintahan desa, khususnya dalam menjelaskan bagaimana tipologi gaya kepemimpinan beroperasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kasus pada satu desa, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Pendekatan kualitatif yang digunakan belum mampu mengukur hubungan secara kuantitatif antara gaya kepemimpinan dan tingkat transparansi. Penelitian selanjutnya disarankan

menggunakan pendekatan komparatif antar desa serta metode kuantitatif atau campuran guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/9781108765381>
- Ardiawati, A. S. R., Rahman, A. Z., & Kismartini. (2022). Pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Management and Public Policy*, 11(3), 396–410. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i3.34699>
- Arifin, B., Wicaksono, E., & Setiawan, I. (2020). Village fund, village governance, and rural development: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.012>
- Asbari, M., Purwanto, A., Fayzhall, M., Goestjahjanti, F. S., Winanti, W., Yuwono, T., Hutagalung, D., Basuki, S., Maesaroh, S., & Mustofa, M. (2022). The role of leadership in organizational performance: A systematic review. *International Journal of Social and Management Studies*, 3(1), 123–136. <https://doi.org/10.5555/ijosmas.v3i1.112>
- Asfarina, S., Yudianto, I., & Hasan, A. N. (2026). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah . *Journal Social Society*, 6(2), 1101–1111. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1216>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmeli khuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 9–22. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- Dwirandra, A. A. N. B., & Astika, I. B. P. (2019). Transparency and accountability in village fund management in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 5(3–4), 299–316. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2019.099321>
- Fachrurrazie, F., & Mursalin, M. (2021). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 45–58. <https://doi.org/10.29313/jak.v10i2.8321>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2020). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.01>
- Kristiansen, S., Yusuf, M., & Komiya, K. (2022). The effect of transparency, accountability and leadership on the effectiveness of village fund management. *Journal of Management*, 1(1), 61–75. <https://doi.org/10.56789/jom.v1i1.6>

- Napitupulu, D., Syafrullah, M., Rahim, R., Simargolang, M. P., & Audah, A. (2018). E-government implementation in Indonesia: Village governance perspective. *Procedia Computer Science*, 124, 255–262. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.153>
- Nguyen, T. T., Nguyen, P. N., & Tran, T. H. (2023). Leadership and public sector performance: Evidence from local government organizations. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 154–166. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.14](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.14)
- Pratolo, S., Sofyani, H., & Riyadh, H. A. (2024). Transparency and public participation in local government governance: Empirical evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 13(1), 46–58. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.05](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.05)
- Raharjo, S., & Santoso, B. (2021). Village governance and public information disclosure in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 156–170. <https://doi.org/10.22146/jsp.58421>
- Sari, T. K., Rocmawati, I., & Nugrahaningsih, N. (2026). Implementasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023. *Journal Social Society*, 6(1), 506–518. <https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.1011>
- Sitorus, D. R. H., Agustian, D., Huda, N., & Sitorus, F. H. (2022). Pengaruh kepemimpinan dan komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 10(1), 9–15. <https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.4327>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2023). Transparency and accountability in local government financial management: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 39–49. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.04](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.04)
- Sopianti, T. (2022). Peran Kepala Desa dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(1), 87–99. <https://doi.org/10.35313/ialj.v3i1.4636>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2016). Theories of collaborative innovation in the public sector. *Public Management Review*, 18(5), 1–20. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1013556>
- Suryanto, S., & Sari, D. (2020). Leadership style and transparency in village government. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(1), 45–59. <https://doi.org/10.18196/jgpp.71127>
- Wulandari, R., & Suryanto, S. (2023). Gaya kepemimpinan kepala desa dan kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 23–38. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15632>
- Yunus, E., & Pamungkas, D. (2021). Kepemimpinan transformasional kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(2), 89–104. <https://doi.org/10.24912/jip.v16i2.9876>